



## “LMAN Menambah 25 Triliun Dana Talangan Pengadaan Tanah untuk PSN”

Jakarta 18 Desember 2017 - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kembali memberikan dana talangan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mendukung program pengembangan infrastruktur nasional. Pembayaran dana talangan itu ditandai dengan penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman antara LMAN dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan tol (BUJT) di Jakarta, Senin (18/12).

Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani berisi penambahan alokasi pembayaran dana talangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2017 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dengan alokasi sebesar 25,286 Triliun. Persetujuan itu berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.958/MK.06/2017 tanggal 20 November 2017. Penandatanganan ini melibatkan 3 pihak, yaitu BPJT sebagai regulator jalan tol, BUJT sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan jalan tol, serta LMAN yang berfungsi sebagai pelaksana fungsional Menteri Keuangan dalam mendanai lahan. “Penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan konsistensi LMAN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sekaligus sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi LMAN dengan lembaga-lembaga terkait” ungkap Direktur LMAN, Rahayu Puspasari.

### LMAN Kelola Kilang LNG Arun

Di tempat yang sama dilakukan pula penandatanganan dokumen Perjanjian Sewa Aktiva Kilang antara LMAN dengan PT Perta Arun Gas (PAG). Penandatanganan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam mendukung revitalisasi industri dan memenuhi kebutuhan energi nasional, khususnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara serta pengelolaan aset negara oleh LMAN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.06/2017 tentang tugas dan peran LMAN. Perjanjian ini merupakan adendum dan *restated* perjanjian sebelumnya terkait sewa Barang Milik Negara berupa aktiva kilang LNG Arun yang akan berakhir pada 31 Desember 2017. Penandatanganan perjanjian ini adalah bagian dari optimalisasi Barang Milik Negara untuk menunjang operasional PT PAG dalam menjalankan bisnis *LNG Receiving & Regasification*.

Direktur LMAN, Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa LMAN sebagai Badan Layanan Umum yang diamanahkan untuk mengelola Aktiva Kilang LNG Arun sangat mendukung pendayagunaan aset yang dilakukan oleh PT PAG dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara. Di sisi lain, PT PAG berharap agar perjanjian ini merupakan bentuk sinergi pemerintah yang ideal. “Penandatanganan perjanjian sewa ini diharapkan menjadi *role model* sebuah perjanjian, sebagai wujud sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta (G to B) dalam rangka mendukung program ketahanan energi nasional” ujar Isro Mukhidin selaku PTH. *President Director* PT PAG.

Kilang LNG Arun merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks PT Pertamina (Persero) yang diserahkan pengelolaannya kepada LMAN. Kawasan ini mempunyai dua bagian yang terdiri dari area *Plant Site* dan *Community*. Area *Plant Site* merupakan area pemrosesan LNG yang secara garis besar terdiri dari fasilitas dan peralatan kilang yang saat ini sudah berumur dan sebagian dalam keadaan rusak. PT PAG dalam proses bisnisnya menggunakan fasilitas dan peralatan antara lain Tangki LNG, *Pipeline*, *Berth* dengan sarana *Marinenya*, *Power Generator* dan gedung kantor. Adapun di area *Community*, PT PAG menggunakan sebagian bangunan berupa gedung, rumah dan *Guest House* untuk keperluan karyawannya. Isro Mukhidin menambahkan, dalam menjalankan bisnis perusahaan, PT PAG telah terlebih dahulu melakukan penambahan dan perbaikan peralatan guna meningkatkan kehandalan operasional fasilitas yang disewa dengan tujuan meningkatkan kegiatan usaha perusahaan.

Perjanjian sewa ini dilatarbelakangi sejarah yang cukup panjang. Diawali dengan ditemukannya potensi gas pertama di Desa Arun, Lhokseumawe, hingga pengapalan terakhir yang dilakukan oleh PT Arun NGL. Setelah dilakukan 4.269 kali pengapalan selama kurun waktu sejak 14 Oktober 1978, sampai dengan 15 Oktober 2014, PT Arun NGL dinyatakan berhenti beroperasi. Pemerintah selaku regulator ingin memastikan keberlangsungan bisnis di kawasan kilang LNG Arun dan mengambil kebijakan dengan menunjuk PT Perta Arun Gas untuk menghidupkan kembali bisnis di Kilang LNG Arun Lhokseumawe.

“LMAN sebagai perwakilan dari Pemerintah tentunya sangat mendukung upaya revitalisasi bisnis yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas, dan akan senantiasa bersinergi dalam rangka mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan optimalisasi aset Barang Milik Negara” pungkas Rahayu Puspasari.